
PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN UMKM DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA¹

Etty Puji Lestari²

Abstrak

Peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini didukung oleh beberapa data indikator ekonomi makro UMKM yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM yang berasal dari internal dan eksternal. Untuk itu dilakukan pengkajian yang komprehensif agar bisa memberikan informasi dan rekomendasi yang tepat bagi para stakeholder untuk dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengembangkan UMKM. Penelitian ini ingin mengkaji pengembangan komoditas unggulan UMKM di Kabupaten Nabire.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk melihat KPJU unggulan di berbagai sektor cocok untuk dikembangkan. Metode ini mengacu pada metode yang dikembangkan Thailand melalui program OTOP, yang cukup sukses dalam mengembangkan UMKM di Thailand.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM yaitu jaringan distribusi atau akses pasar, kebutuhan modal kerja, keleluasaan menetapkan harga, pelatihan dan aksesibilitas modal. Sementara itu subsektor prioritas pada tingkat kabupaten yang perlu dikembangkan adalah perkebunan jeruk, perkebunan coklat, tanaman padi dan kedelai, industri kecil mebel dan perdagangan. Berdasarkan potensi yang ada dan permasalahan yang dihadapi maka dilakukan benchmarking untuk 3 komoditas unggulan yaitu jeruk, coklat dan kakao. Rekomendasi yang diberikan antara lain kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu komoditas melalui program pengendalian hama, peremajaan tanaman, pemberdayaan petani, pengembangan manajemen pasca panen, akses kredit bagi UMKM dan kelembagaan usaha.

Kata Kunci : *Komoditas Unggulan, UMKM, Analytic Hierarchy Process*

¹ Bagian dari *joint research* Pengembangan UMKM dengan BAPPEDA Kabupaten Nabire

² Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dan Konsultan Ekonomi di Kabupaten Nabire Papua

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi lokal sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun demikian konsep pengembangan ekonomi lokal dan teknik implementasinya terus berkembang. Secara umum pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha untuk mengembangkan ekonomi daerah. Akumulasi kegiatan tersebut diharapkan akan berpengaruh besar pada pengembangan daya saing ekonomi nasional dan penguatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu faktor penting yang mendukung penguatan daya ekonomi lokal adalah kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini didukung oleh beberapa data indikator ekonomi makro UMKM yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM tahun 2007 mencapai 49,82 juta unit, meningkat menjadi 51,26 juta unit tahun 2008. Berdasarkan kategori, porsi yang paling besar adalah segmen usaha mikro yang mencapai sekitar 99 persen dari total jumlah UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia pada 2009 mencapai 520.220 unit (BPS, 2010). Diperkirakan akan ada 600.000 pelaku UMKM baru pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa sektor tertinggi investasi yang dilakukan kalangan UMKM adalah di bidang jasa (57 persen), perdagangan (20 persen) dan manufaktur (23 persen). Besarnya skala bisnis sektor UMKM dan Koperasi diperkirakan mencapai 54 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jumlah yang demikian besar tersebut menunjukkan, UMKM memiliki peran besar dalam menopang ekonomi nasional. Karena itu, pengembangan UMKM harus mendapat perhatian yang besar.

Perkembangan UMKM yang pesat juga terjadi di Kabupaten Nabire, Papua. UMKM di Nabire sebanyak 190 unit pada tahun 2005 menjadi 253 unit pada tahun 2009 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,58 persen per tahun (lihat Tabel 1). Dari sisi penyerapan tenaga kerja, hal ini menunjukkan peningkatan yaitu dari sebanyak 93 orang menjadi 131 orang atau mengalami peningkatan sekitar 40,8 persen. Kinerja ini perlu semakin ditingkatkan. Dilihat dari pendapatannya, maka terlihat bahwa nilai omzet yang dihasilkan oleh UMKM Kabupaten Nabire meningkat, mulai dari Rp 6,036 juta pada tahun 2005 menjadi Rp 7,497 juta pada tahun 2009. Dengan demikian keberadaan UMKM perlu didukung agar lebih menguatkan daya saing pemerintah daerah.

Tabel 1. Jumlah UMKM Nabire Tahun 2005-2009

JENIS	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah UMKM (unit)	190	224	237	246	253
Nilai Modal Kerja & Investasi UMKM (Rp. Juta)	287	379	415	437	451
Nilai Omzet UMKM (Rp. Juta)	6.036	6.829	6.989	7.151	7.497
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM (orang)	93	112	118	123	131

Sumber: Dinas Koperindag Nabire, 2010

Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM. Kendala pengembangan UMKM tersebut antara lain berasal dari internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya permodalan, keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya jaringan usaha (BPS Kabupaten Nabire, 2010). Sementara itu kendala eksternal meliputi iklim usaha yang belum kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana, implikasi otonomi daerah dan perdagangan bebas, sifat produk dengan *lifetime* rendah dan keterbatasan akses pasar.

Selama ini pengembangan komoditas unggulan UMKM dalam menentukan daftar skala prioritasnya menggunakan kriteria data produksi, pendapat instansi dan data primer responden UMKM pada suatu KPJU (komoditas, produk, dan jenis usaha) di suatu kecamatan. Namun saat ini telah terjadi perubahan yang cukup mendasar, dimana penetapan KPJU unggulan daerah di Kabupaten/Kota menggunakan metode *Analytic Hierarchy Proccess* (AHP), dengan harapan dalam tiap-tiap Kabupaten/Kota di suatu provinsi akan mempunyai KPJU unggulan di berbagai sektor yang patut dan cocok untuk dikembangkan. Metode ini mengacu pada metode yang dikembangkan Thailand melalui program OTOP, yang cukup sukses dalam mengembangkan UMKM di Thailand. Dengan metode ini maka pemerintah daerah dapat menetapkan program yang lebih fokus untuk mengembangkan KPJU unggulan tertentu di suatu Kabupaten/Kota, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan KPJU unggulan ini dapat menggerakkan KPJU-KPJU lain karena bekerjanya mekanisme *backward linkages* maupun *forward linkages*. Dengan demikian angka kemiskinan akan menurun, dan pertumbuhan ekonomi secara umum akan meningkat.

Selain mendorong pemerintah untuk lebih fokus, penetapan KPJU prioritas (unggulan) juga akan mendorong pemerintah mampu kebijakan yang tepat karena

keragaman pola skala efisiensi dari tiap-tiap KPJU. Secara teori, setiap produk ataupun jenis jasa (KPJU) tertentu, akan memiliki skala ekonomis yang berbeda dengan produk ataupun jasa (KPJU) yang lain. KPJU yang memiliki skala ekonomis rendah, maka dalam industri KPJU tersebut akan sulit menghalangi *entrant* masuk (Martin, 1994). Karena begitu mudahnya *entrant* masuk dalam industri, maka skala usaha KPJU untuk masing-masing unit akan kecil. Untuk kasus yang demikian maka strategi kebijakan yang tepat guna meningkatkan efisiensi industri adalah dengan membentuk *clustering* berupa sentra-sentra industri, ataupun suatu kawasan industri. Sebaliknya untuk KPJU dengan skala ekonomis yang besar, maka dalam industri tersebut dengan sendirinya akan sulit bagi *entrant* baru masuk. Untuk KPJU yang demikian, maka kebijakan pemerintah yang tepat adalah mendorong dan memfasilitasi unit usaha KPJU tersebut guna mencapai skala ekonomisnya, dengan cara mengatur persaingan yang sehat, yaitu dengan mengembangkan *contestable market*.

METODE PENELITIAN

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *The Analytic Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan salah satu model untuk pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarkhi fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki tahapan bertingkat. Oleh karena itu hasil yang analisis yang satu akan terkait dengan analisis pada tahap sebelumnya.

Pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarkhi; memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Prinsip metode AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan KPJU unggulan suatu daerah.

Dalam proses AHP ini dilakukan 3 tahap utama yaitu pembobotan, klasifikasi intensitas tiap indikator dan penentuan nilai intensitas tiap indikator dan peringkat.

1. Pembobotan terhadap faktor, variabel dan indikator, dilakukan oleh 15 orang *stakeholders* (responden) di tingkat kabupaten dengan menggunakan kuesioner AHP.
2. Langkah pertama yang digunakan adalah pembobotan untuk tujuan. Pembobotan tujuan ini berguna untuk mengetahui faktor apa yang menjadi prioritas tujuan dalam melakukan penguatan UKM. Secara umum, penguatan UKM di suatu daerah memiliki tiga tujuan utama yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing.
3. Pembobotan berikutnya adalah pembobotan kriteria. Pembobotan Kriteria dimaksudkan untuk menetapkan kriteria yang akan digunakan dalam pengembangan UKM di Kabupaten Nabire. Pembobotan dilakukan dua kali yaitu:
 - a. Memberi bobot pada variabel. Kriteria KPJU dapat dinyatakan sebagai unggulan ada 9 aspek yaitu: (i) tenaga kerja, (ii) bahan baku, (iii) modal, (iv) sarana produksi/usaha, (v) teknologi, (vi) manajemen usaha, (vii) ketersediaan pasar, (viii) harga dan sumbangan terhadap perekonomian daerah. Total bobot dalam variabel ini adalah 1. Semakin besar bobot yang diberikan berarti semakin besar tingkat kepentingan kriteria tersebut.
 - b. Memberi bobot pada indikator

Tabel 2. Variabel dan indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Tenaga kerja	Tingkat pendidikan
		Pelatihan
		Pengalaman kerja
2	Bahan baku	Ketersediaan (menggambarkan <i>networking</i> bahan baku)
		Harga bahan baku
		Kesinambungan (menggambarkan <i>networking</i> bahan baku)
		Mutu bahan baku
3	Modal	Kebutuhan investasi awal
		Kebutuhan modal kerja
		Aksesibilitas (menggambarkan <i>networking</i> modal)
4	Sarana produksi/usaha	Ketersediaan
		Harga
		Kemudahan
5	Teknologi	Ketersediaan
		Kemudahan
		Kesiapan penggunaan teknologi
6	Manajemen usaha	kemampuan manjerial
7	Ketersediaan pasar	Jaringan distribusi atau akses pasar
8	Harga	Keleluasaan menetapkan harga yaitu tingkat harga yang bisa diterima pasar, dan margin harga

9	Sumbangan terhadap perekonomian daerah	<i>Backward dan forward linkages</i>
		integrasi vertikal

4. Matriks Bobot sektor/sub sektor setiap distrik sampel

Matriks bobot sektor/sub sektor untuk setiap distrik yang digunakan sebagai sampel ditujukan untuk melihat persepsi para stakeholders di tingkat Kabupaten Nabire mengenai kondisi sektor/subsector di masing-masing distrik. Bobot yang lebih besar menunjukkan bahwa sektor/sub sektor tersebut lebih potensial dibandingkan sektor yang lain.

5. Pembobotan juga dilakukan di 6 Distrik yaitu Nabire Barat, Teluk Kimi, Nabire, Makimi, Uwapa, Wanggar. Sampel yang diambil di masing-masing distrik adalah 6 orang yaitu:

- a. Petugas Pertanian (1 orang)
- b. Petugas Statistik (1 orang)
- c. Seksi/Staf perekonomian distrik (1 orang)
- d. Staf BRI/perbankan/lembaga keuangan lain (2 orang)

6. Matriks bobot sektor/sub sektor untuk setiap distrik yang digunakan sebagai sampel ditujukan untuk melihat persepsi para stakeholders di tingkat distrik mengenai kondisi sektor/subsector di distrik masing-masing

7. Hasil pembobotan responden diperoleh dengan rata-rata geometris sehingga menghasilkan satu bobot yang sama.

8. Klasifikasi intensitas tiap indikator. Sebelum diolah dengan *software expert choice*, setiap indikator baik yang berasal dari data primer maupun sekunder diklasifikasikan untuk memperoleh intensitas masing-masing. Data-data primer yang diperoleh dari kuesioner persepsi responden diolah dengan bantuan SPSS atau Microsoft Excell sehingga diperoleh tabulasi yang menunjukkan intensitas tiap-tiap indikator berdasarkan pemeringkatan. Intensitas tersebut berupa skala *likert* 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan ukuran dari kondisi yang paling buruk sampai kondisi yang paling baik. Indikator-indikator kuantitatif berupa data sekunder (*existing statistics data*), masing masing juga diklasifikasikan dengan menggunakan 'metode rata rata' dan 'metode distribusi' sehingga diperoleh intensitasnya ke dalam skala likert yang sama. Daftar intensitas indikator-indikator yang berasal hasil olahan data primer berupa persepsi pelaku usaha tersebut di atas, dijadikan bahan masukan

bagi peneliti untuk memperoleh intensitas akhir setiap indikator. Keputusan akhir atas intensitas setiap indikator dari panelis inilah yang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan perangkat lunak '*expert choice*' untuk mendapatkan nilai intensitas tiap indikator dan peringkat KPJU unggulan di tingkat Kabupaten.

9. Penentuan nilai intensitas tiap indikator dan peringkat. Intensitas masing masing indikator kemudian dimasukkan ke dalam data base perangkat lunak '*expert choice*' berdasar hirarki dan bobot pemeringkatan yang telah ditentukan sebelumnya. Olahan perangkat lunak tersebut menghasilkan nilai masing masing indikator yang secara kumulatif membentuk urutan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner, FGD dan *indepth interview* diketahui bahwa pengembangan UMKM di Nabire diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Rata-rata bobot tujuan pengembangan UMKM terbesar adalah pertumbuhan ekonomi (0,3818). Pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama dalam persepsi responden karena pertumbuhan ekonomi dipandang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Responden melihat bahwa tujuan usaha baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, maupun jasa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Prioritas kedua secara rata-rata adalah peningkatan daya saing (rata-rata bobot 0,3182).

Dalam FGD, daya saing dipandang menjadi hal yang lebih utama dibanding dengan penciptaan lapangan kerja karena alasan-alasan berikut:

- a. Para responden menyatakan bahwa selama ini usaha mereka hanya terbatas pada distrik atau kabupaten dan tidak berkembang secara lebih luas. Mereka memandang peningkatan daya saing merupakan tujuan pengembangan UMKM yang patut mendapat perhatian, supaya mereka dapat mengembangkan usaha terutama pemasaran ke daerah yang lebih luas
- b. Sebagian responden terutama LSM juga melihat, perkembangan UMKM di Nabire masih lebih banyak dilakukan oleh para pendatang dibanding dengan penduduk asli. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan ekonomi yang terjadi tidak semakin kecil. Daya saing yang dipersepsikan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada daya saing komoditas, namun juga daya saing SDM terutama penduduk asli. Daya saing ini

dibutuhkan bukan hanya untuk memperluas pasar namun juga untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat

- c. Responden juga menganggap bahwa daya saing menjadi lebih penting dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja. Persepsi ini muncul karena rata-rata UMKM yang ada di Nabire berada dalam skala yang kecil dan cenderung bersifat usaha rumah tangga, mikro atau kecil dan belum memiliki skala menengah. Selama ini tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja keluarga. Responden juga menyatakan tidak terlalu risau dengan masalah pengangguran.

Tabel 3. Hasil Pembobotan AHP Tujuan Pengembangan UMKM

AHP TUJUAN	RATA-RATA
Pertumbuhan ekonomi	0,3818
Penciptaan lapangan kerja	0,3000
Peningkatan daya saing	0,3182
TOTAL BOBOT	1,0000

Sumber: Data primer diolah

Ranking terakhir yang dipilih oleh responden penciptaan lapangan kerja (bobot rata-rata 0,3000). Bobot ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tetap harus memperhatikan penciptaan lapangan kerja. Selisih bobot antar tujuan yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa sebenarnya para pelaku usaha dan pemangku kepentingan menganggap bahwa tiga tujuan pengembangan UMKM ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ketiga tujuan ini harus mendapat perhatian dalam pengembangan UMKM terutama setelah KPJU unggulan terpilih.

Pengembangan UMKM tidak terlepas dari hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Secara umum permasalahan pengembangan UMKM terkait dengan permasalahan ketrampilan, manajemen usaha, permodalan, ketersediaan bahan baku, ketersediaan pasar, kemampuan mengadopsi teknologi dan lain-lain. Hasil kuesioner, *indepth interview* dan FGD menunjukkan hasil urutan berdasarkan tingkat kepentingan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pembobotan AHP Kriteria Pengembangan UMKM

AHP KRITERIA	RATA-RATA
Modal	0,18
Bahan baku	0,15
Tenaga kerja	0,14
Sarana produksi/usaha	0,12
Manajemen usaha	0,12
Ketersediaan pasar	0,10
Teknologi	0,70
Harga	0,70
Sumbangan terhadap perekonomian daerah	0,50
TOTAL BOBOT	1,00

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan persepsi responden, hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM di Nabire adalah Modal. Permodalan dipandang menjadi masalah yang paling penting untuk diperhatikan karena sebagian besar responden merasakan kesulitan mendapatkan modal. Bahan baku merupakan hal kedua yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pengembangan UMKM.

Menurut responden, aspek tenaga kerja merupakan aspek yang penting dalam pengembangan UMKM. Masalah tenaga kerja yang disoroti bukan dari sisi penciptaan lapangan kerja namun lebih dari sisi ketrampilan. Distrik Nabire Barat menyatakan keinginan untuk memanfaatkan BLK yang selama ini tidak berfungsi untuk mengembangkan ketrampilan SDM. Ketrampilan SDM yang bersifat kebiasaan dan diperoleh secara *learning by doing* maupun dilakukan karena telah bersifat turun temurun, dianggap menyebabkan hasil usaha terutama kerajinan tidak dapat berkembang optimal dan memiliki daya saing yang baik.

Sarana produksi/usaha ternyata menjadi masalah yang dianggap penting terutama di Distrik Nabire Barat, Wanggar, dan Makimi. Sarana produksi tidak hanya menyangkut faktor-faktor pendukung usaha (misalnya pestisida, pupuk bagi usaha pertanian) namun terutama menyangkut infrastruktur jalan produksi. Seperti permasalahan tradisional UMKM di seluruh Indonesia adalah tidak adanya manajemen usaha yang bagus. Ketersediaan pasar dipandang menjadi faktor yang penting dalam pengembangan UMKM. Tanpa adanya pasar, maka usaha yang dijalankan tidak akan berkembang dengan baik.

Secara lebih rinci pembobotan tujuan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh para stakeholders menunjukkan bahwa untuk variabel tenaga kerja, faktor yang dipandang paling penting adalah pelatihan kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Para stakeholders menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nabire perlu membuat lebih banyak pelatihan untuk pengembangan UMKM, karena tenaga terampil merupakan salah satu hal utama dalam mengembangkan UMKM.

Sedangkan dari sisi bahan baku, para stakeholders melihat bahwa yang paling perlu dikembangkan di Kabupaten Nabire adalah adanya kesinambungan penyediaan bahan baku. Hal ini menggambarkan *networking* bahan baku. Hal berikutnya yang penting adalah ketersediaan, harga bahan baku dan terakhir adalah mutu bahan baku. Untuk meningkatkan jejaring, tentu saja pengusaha tidak dapat melakukannya sendiri, pemerintah harus memiliki fungsi sebagai pemampu (*enabler*) dan pemrakarsa.

Hal lain yang patut mendapat perhatian dalam pengembangan UMKM adalah permodalan, baik dari sisi kebutuhan modal kerja, aksesibilitas modal dan kebutuhan awal investasi. Pemerintah kabupaten Nabire perlu mengadakan kerjasama yang lebih mendalam dengan perbankan. Kerjasama seyogyanya tidak hanya bersifat insidental, namun merupakan program yang dimasukkan dalam rencana pembangunan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius karena pengembangan UMKM tidak dapat terlepas dari permodalan. Dalam pengembangan permodalan sendiri dibutuhkan skema untuk modal kerja dan investasi dengan tata kelola yang berbeda.

Tabel 5. Hasil Pembobotan AHP Tujuan Pengembangan UMKM

Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator
Tenaga kerja	0,14	Tingkat pendidikan	0.04
		Pelatihan	0.065
		Pengalaman kerja	0.035
Bahan baku	0,15	Ketersediaan (<i>networking</i> bahan baku)	0.04
		Harga bahan baku	0.035
		Kesinambungan (<i>networking</i> bahan baku)	0.05
		Mutu bahan baku	0.025
Modal	0,18	Kebutuhan investasi awal	0.045
		Kebutuhan modal kerja	0.075
		Aksesibilitas (<i>networking</i> modal)	0.06
Sarana produksi/usaha	0,12	Ketersediaan	0.06
		Harga	0.02
		Kemudahan	0.04

Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator
Teknologi	0,07	Kemudahan	0.025
		Kesiapan penggunaan teknologi	0.045
Manajemen usaha	0,12	kemampuan manjerial	0.12
Ketersediaan pasar	0,10	Jaringan distribusi atau akses pasar	0.1
Harga	0,07	Keleluasaan menetapkan harga yaitu tingkat harga yang bisa diterima pasar, dan margin harga	0.07
Sumbangan terhadap perekonomian daerah	0,05	<i>Backward dan forward linkages</i>	0.03
		integrasi vertikal	0.02

Sumber: data primer yang diolah

Pengembangan UMKM juga perlu memperhatikan ketersediaan sarana produksi, kemudahan untuk mendapatkan sarana produksi tersebut dan harga sarana produksi. Sedangkan permasalahan yang perlu disiapkan untuk faktor teknologi adalah kesiapan mengadopsi teknologi baru dan kemudahan mendapatkan teknologi tersebut. Hal ini disebabkan karena menurut para stakeholders, sebagian besar UMKM masih menggunakan teknologi yang relatif tradisional. Peran pemerintah kembali diperlukan untuk mengembangkan faktor teknologi ini.

Faktor lain yang penting diperhatikan adalah kemampuan manajerial, adanya jaringan distribusi dan akses pasar, keleluasaan menetapkan harga dan masalah keterkaitan antar UMKM. Ke empat hal terakhir ini juga tidak dapat dikerjakan sendiri oleh UMKM, karena keterbatasannya. Sehingga pemerintah perlu melakukan langkah serius melalui dinas-dinas terkait untuk membuat rencana pengembangan UMKM yang lebih komprehensif. Hasil pengurutan dari faktor yang penting dalam pengembangan UMKM adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Faktor Yang Penting Dalam Pengembangan UMKM

Faktor	Nilai
Kemampuan Manjerial	0.120
Jaringan distribusi atau akses pasar	0.100
Kebutuhan modal kerja	0.075
Keleluasaan menetapkan harga yaitu tingkat harga yang bisa diterima pasar, dan margin harga	0.070
Pelatihan	0.065
Aksesibilitas (menggambarkan <i>networking</i> modal)	0.060
Ketersediaan	0.060

Kesinambungan (menggambarkan <i>networking</i> bahan baku)	0.050
Kebutuhan investasi awal	0.045
Kesiapan penggunaan teknologi	0.045
Tingkat pendidikan	0.040
Ketersediaan (menggambarkan <i>networking</i> bahan baku)	0.040
Kemudahan	0.040
Pengalaman kerja	0.035
Harga bahan baku	0.035
<i>Backward dan forward linkages</i>	0.030
Mutu bahan baku	0.025
Kemudahan	0.025
Harga	0.020
integrasi vertikal	0.020

Pemetaan sektor atau subsektor unggulan di masing-masing distrik dilakukan melalui FGD, *indepth interview* dan kuesioner. Dalam pemetaan sektor atau subsektor unggulan ini sebagian besar sektor (yang relevan) yang menjadi pembentuk PDRB ditawarkan kepada responden, untuk diberi bobot masing-masing.

Dari hasil pengolahan data primer menunjukkan bahwa tidak semua distrik memiliki sembilan subsektor yang dapat dikembangkan. Hanya Distrik Nabire yang memiliki kesembilan sektor tersebut secara lengkap. Namun di lain pihak Distrik Uwapa melihat terdapat satu subsektor baru yang bisa dikembangkan yaitu subsektor pertambangan. Secara lebih rinci Tabel 7. menunjukkan prioritas pengembangan yang dipilih oleh masing-masing distrik.

Tabel 7. Subsektor Prioritas Berdasarkan Distrik

NABIRE	NABIRE BARAT	WANGGAR	UWAPA	MAKIMI	TELUK KIMI
Perdagangan	Tanaman pangan	Perkebunan	Tanaman pangan	Tanaman pangan	Tanaman pangan
Jasa-jasa	Perkebunan	Industri	Peternakan	Perkebunan	Perkebunan
Angkutan	Peternakan	Tanaman pangan	Perkebunan	Perikanan	Peternakan
Perikanan	Industri	Peternakan	pertambangan	Peternakan	Perikanan
Tanaman pangan	Perdagangan	Perdagangan	Industri	Industri	Jasa-jasa
Industri	Perikanan	Perikanan	Jasa-jasa	Perdagangan	Pariwisata
Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	Perikanan	Angkutan	Industri
Peternakan	Angkutan	Angkutan	Angkutan	Jasa-jasa	Perdagangan
Perkebunan	Jasa-jasa	Jasa-jasa	Perdagangan	Pariwisata	Angkutan
			Pariwisata		

Sumber: Data primer yang diolah

Secara umum ke lima distrik yang dipilih sebagai sampel memilih subsektor tanaman pangan sebagai subsektor unggulan, kecuali distrik Nabire memilih sektor perdagangan sebagai sektor unggulan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan antar Kabupaten mengenai KPJU unggulan, namun subsektor tanaman pangan menempati peringkat pertama pengembangan. Peringkat kedua adalah Perkebunan (dipilih oleh distrik Nabire Barat, Wanggar, dan Teluk Kimi). Sedangkan Distrik Uwapa dan Makimi melihat bahwa peternakan memiliki peluang yang lebih besar, dan distrik Nabire memilih sektor Jasa. Bila dilihat secara keseluruhan, pada dasarnya sektor pertanian dalam arti luas masih merupakan sektor dominan di Kabupaten Nabire.

Tabel 8. Subsektor Prioritas di Tingkat Kabupaten

PRIORITAS	SUBSEKTOR
1	Perkebunan: Jeruk
2	Perkebunan: Kakao
3	Tanaman Pangan: Padi
4	Tanaman Pangan: Kedelai
5	Industri kecil: Mebel
6	Perdagangan

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil *indepth interview*, kuesioner dan FGD maka diperoleh hal-hal yang menjadi kendala utama pengembangan UMKM dan KPJU di Kabupaten Nabire yaitu masalah permodalan, manajemen usaha, akses pasar dan ketidakstabilan harga. Masalah-masalah klasik yang dihadapi UMKM tersebut selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah agar UMKM mampu bersaing.

PENUTUP

Kabupaten Nabire merupakan kabupaten yang mampu berkembang dengan baik terutama bila didukung dengan pengembangan UMKM secara tepat. Berdasarkan persepsi responden, hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM di Nabire adalah modal, diikuti dengan bahan baku, tenaga kerja dan sarana produksi, manajemen usaha. Berdasarkan AHP juga diperoleh 5 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM adalah jaringan distribusi atau akses pasar, kebutuhan modal kerja, keleluasaan menetapkan harga, pelatihan dan aksesibilitas modal. Peran pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung

eksistensi UMKM sangat diperlukan agar UMKM dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

REFERENSI

Anggoro, U. K. 2011. Pedoman Pelaksanaan SL-PTT 2011. DIRJEN Tanaman Pangan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire. 2010. Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Nabire: Angka Sementara. BPS Kabupaten Nabire

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire. 2009. *Kabupaten Nabire dalam Angka 2009*. BPS Kabupaten Nabire.

Dinas Koperindag Kabupaten Nabire. 2010. Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Nabire.

FAO. 2009. *The State of Agricultural Commodity Markets*.

Prihatman, K. 2000. Sistem Informasi Manajemen Pembangunan di Pedesaan. BAPPENAS.